



**BUPATI BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BIMA**  
**NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BIMA**  
**NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN**  
**PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata dan mengatur ketentuan pemberian dan pemanfaatan insentif agar sesuai dengan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Bima Nomor 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bima 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bima 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tekhnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bima Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bima Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tekhnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 445), diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 seluruhnya berbunyi :

#### Pasal 53

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing yang terdiri dari :
    - Pejabat;
    - Pegawai Negeri Sipil; dan
    - Pegawai Non PNS
  - b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
  - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.
- (4) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah realisasi Retribusi Daerah yang di setor ke Kas Daerah;

- (5) Insentif sebesar 5% sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan pencapaian kinerja tertentu yang diatur dan diberikan berdasarkan jenis/objek Retribusi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. semua jenis Retribusi Perizinan Tertentu :
    - untuk triwulan I prosentasenya sebesar 12%
    - untuk triwulan II prosentasenya sebesar 30%
    - untuk triwulan III prosentasenya sebesar 65%
    - untuk triwulan IV prosentasenya sebesar 100%
  - b. Perangkat Daerah pengelola retribusi perizinan tertentu yang telah menyelesaikan proses administrasi pengelolaan retribusi jasa usaha menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen daerah pendapatan (SIMDA Pendapatan) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- II. Di antara Ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan Pasal 53E dan 53F, yang seluruhnya berbunyi :

#### Pasal 53E

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Pasal 53F

Besaran Pembayaran Insentif setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :

- a. Di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- b. Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- c. Di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- d. Di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima  
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima  
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

  
H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2020 NOMOR 569

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BIMA  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 17  
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**  
**BADAN PENGELOLA PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH (BPPKAD)**

Kompleks Kantor Bupati Bima Jln. Soekarno-Hatta Nomor : 1 Desa Dadibou Kecamatan  
Woha Kabupaten Bima  
Email : bppkadbima@gmail.com

**SURAT KETERANGAN SIMDA PENDAPATAN**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Menerangkan bahwa Perangkat Daerah sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah :  
Alamat :

Benar-benar telah menyelesaikan proses input data pada Aplikasi SIMDA  
Pendapatan sebagaimana yang atur dalam peraturan perundang-undangan yang  
berlaku.  
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana  
mestinya.

Bima, .....

**Kepala Badan Pengelola Pendapatan  
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD),**

.....  
NIP. ....

BUPATI BIMA

Hj. INDAM DHAMAYANTI PUTRI